



PENETAPAN

Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah sekaligus Cerai Talak antara:

ARIFIN bin ALI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Transmigrasi Km.4, Komplek Citra Mega Persada 2 No.D.15, Rt.008, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon;
melawan

JUMIATI binti MASDAR, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Transmigrasi Km.4, Komplek Citra Mega Persada 2 No.D.15, Rt.008, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin

Halaman 1 dari 7 Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blcn



dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.BlcN tanggal 14 September 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2006, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu bernama MUIN di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon bernama MASDAR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ARSYAD dan H. USIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus Janda (pernah menikah dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama ANDRI SUBANDIT, dan telah bercerai dibawah tangan juga pada tahun 2005);
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah Pemohon sendiri sebagaimana alamat Pemohon diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama SITI KHAFIZAH binti ARIFIN, umur 11 tahun, sekarang anak ikut dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.BlcN



8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon telah menikah siri lagi dengan laki-laki lain;
10. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2019, dimana Pemohon telah menyerahkan Termohon sepenuhnya kepada orangtua Termohon;
11. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon dan Termohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon kepada KUA yang berwenang;
12. Bahwa sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
13. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**ARIFIN bin ALI**) dengan Termohon (**JUMIATI binti MASDAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 29

Halaman 3 dari 7 Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blcn



November 2006 di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (**ARIFIN bin ALI**) terhadap
Termohon (**JUMIATI binti MASDAR**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Sudsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di
muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut
pada tanggal 15 September 2020, akan tetapi alamat Termohon saat ini tidak
diketahui secara pasti dan sudah tidak tinggal di alamat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mencabut
perkaranya, dan akan memastikan terlebih dahulu alamat Termohon tinggal
saat ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan
perkaranya kepada Majelis Hakim secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon
tidak hadir;

Halaman 4 dari 7 Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sebelum perkaranya diperiksa dan Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, sedangkan apabila setelah ada jawaban dari Termohon, maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Termohon belum mengajukan jawaban atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin permohonannya dicabut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah sekaligus Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum *syar'i* yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blcn



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 519/Pdt.G/2020/PA Blcn, selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1442 Hijriyah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)